



# BUPATI KUBU RAYA

---

## PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 05 TAHUN 2008

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUBU RAYA

#### BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4751);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUBU RAYA.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati, adalah Bupati Kubu Raya
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

#### BAB II

#### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya.

#### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1). Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
- (2). Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

#### Pasal 4

Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Pendidikan Luar Sekolah, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, pendidikan luar sekolah, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- b. Pemberikan bimbingan dan pembinaan kepada sekolah-sekolah sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dasar, pendidikan luar sekolah, kebudayaan, pemuda dan olah raga;

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penyelenggaraan administrasi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Penilik serta Jabatan fungsional lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**WILAYAH KERJA**

**Pasal 11**

Unit Pelaksana Teknis Dinas berkedudukan dengan wilayah kerjanya sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas di Sungai Raya berkedudukan di Sungai Raya dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Raya;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas di Sungai Ambawang berkedudukan di Sungai Ambawang dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Ambawang;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kuala Mandor B berkedudukan di Kuala Mandor B dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Kuala Mandor B;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas di Rasau Jaya berkedudukan di Rasau Jaya dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rasau Jaya;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kubu berkedudukan di Kubu dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Kubu;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas di Terentang berkedudukan di Terentang dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Terentang;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas di Batu Ampar berkedudukan di Padang Tikar dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Batu Ampar;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas di Sungai Kakap berkedudukan di Sungai Kakap dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Kakap;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas di Teluk Pakedai berkedudukan di Teluk Pakedai dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Teluk Pakedai;

**BAB VI**  
**TATA KERJA DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Kerja**

**Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan arahan kepada bawahan.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**

**Pasal 14**

- (1). Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2). Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 15

Belanja Unit Pelaksana Teknis Dinas disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain di luar pemerintah. Khusus untuk pembiayaan pada tahun anggaran 2008 tetap mengacu pada anggaran yang tercantum dalam APBD Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 5-2-08  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Ditetapkan di : Sungai Raya  
pada tanggal : 5 Februari 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



Drs. KAMARUZZAMAN, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2008 NOMOR 05

- (2). Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 15

Belanja Unit Pelaksana Teknis Dinas disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain di luar pemerintah. Khusus untuk pembiayaan pada tahun anggaran 2008 tetap mengacu pada anggaran yang tercantum dalam APBD Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

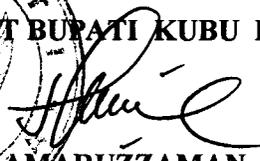
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 5-3-2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Ditetapkan di : Sungai Raya  
pada tanggal : 5 Februari 2008  
  
PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,  
  
Drs. KAMARUZZAMAN, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2008..... NOMOR 05.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

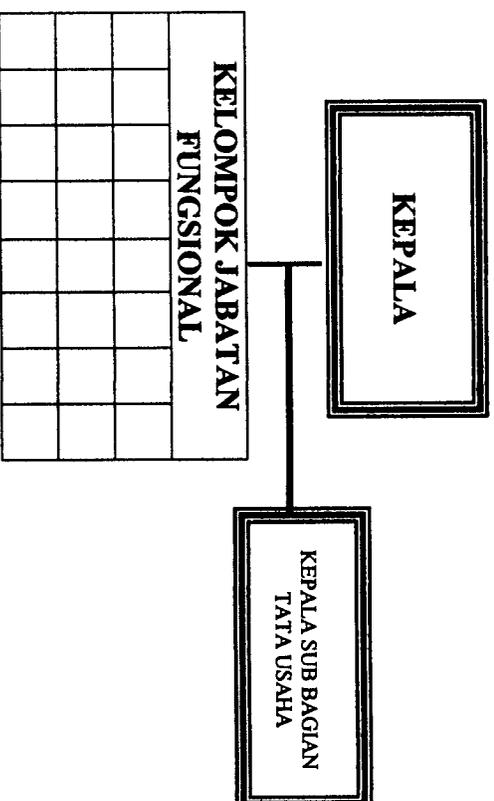
NOMOR : 05 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 Februari 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR RASAU JAYA SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUBU RAYA

---

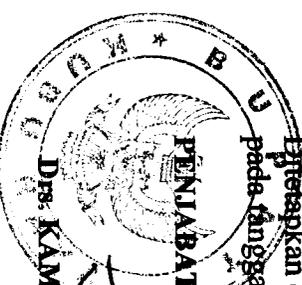
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR RASAU JAYA  
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUBU RAYA



Dundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 5-2-08  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 5 Februari 2008

DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
Jumlah 2008 ..... NOMOR 05 .....

  
PENJABAT BUPATI KUBU RAYA  
Drs. KAMARUZZAMAN, MM